

POLITIK ISLAM DI AFGHANISTAN: STUDI TERHADAP KEKUASAAN KELOMPOK TALIBAN

Septian Fatianda*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia

ABSTRACT

Afghanistan is an Islamic country that has a long history of conflict. Politics in Afghanistan has always been colored by coup actions that have occurred repeatedly in every ruling leader. Since 1994, a movement consisting of Afghan students has formed an extremist group called the Taliban. This group has even become the sole ruler who controls the country since the coup against Ashraf Gani in 2021. This paper wants to see how the embryo of the conflict led to the emergence of the very strong Taliban group in Afghanistan. The method used in this study is the historical method with four method steps; heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. Sources of research data were obtained from tracking results of literature sources relevant to this study. The results of the study show that Afghanistan is a country that has never been separated from war. In the present context, the Taliban has become a full ruler with an authoritarian leadership style. Under the rule of the Taliban, the political and security conditions in Afghanistan were far from conducive, many policies restricted people's freedoms, especially women, who were the most affected group with policies limiting their rights.

ARTICLE HISTORY

Received 31/03/2023
Revised 11/04/2023
Accepted 18/04/2023
Published 19/04/2023

KEYWORDS

Afghanistan; Taliban; conflict.

*CORRESPONDENCE AUTHOR

✉ septianfatianda@gmail.com

PENDAHULUAN

Afghanistan merupakan sebuah negara yang terletak di kawasan Asia Selatan dan dikenal sebagai wilayah yang sering dilanda konflik politik. Di bawah pimpinan Taliban sekarang, negara Afghanistan mengadopsi sistem politik yang keras dan memberlakukan syariat Islam dengan sangat kuat kepada seluruh rakyatnya. Bila ditilik dari aspek historis, Islam mulai memasuki wilayah Afghanistan yaitu pada masa era Utsman bin Affan (Supriadi, 2008). Saat itu, panglima besar Islam bernama Sa'ad bin Abi Waqash melakukan ekspedisi dan berhasil menundukkan wilayah di Khurasan. Saat ini Khurasan merupakan wilayah yang terletak di negara Afghanistan, Iran, serta di beberapa negara yang merupakan bekas Uni Soviet. Islam tercatat menyebar ke Afghanistan sekitar tahun 647 M. Di Afghanistan, Islam telah mengakar dengan kuat ketika wilayah Afghanistan dikuasai oleh dinasti Ghaznaviyah (Supriadi, 2008).

Satu hal yang menjadi satu kemiripan antara Afghanistan dengan beberapa negara-negara Islam pada umumnya di wilayah Timur Tengah adalah kondisi politik yang sering bergejolak akibat konflik. Negara seperti Mesir, Palestina, Irak, Libya, Syria, dan Lebanon menjadi potret negara Islam yang sering menghadapi situasi politik dan keamanan mencekam dalam bentuk perang di negara tersebut. Keberadaan sumber daya alam melimpah yang dimiliki Afghanistan berupa gas alam, tembaga, sulfur, barit, batu-batu mulia, timah, minyak bumi, batu bara, serta bijih besi menjadi alasan mengapa negara-negara ini sering diincar oleh imperialisme barat (Syarifuddin, 2016).

Posisi strategis secara geografis ini membuat wilayah Afghanistan menjadi rebutan dua penguasa besar di akhir abad ke-18 yaitu Inggris dan Uni Soviet. Uni Soviet sebagai pemegang kendali di wilayah Asia Tengah dan Inggris sebagai pemegang kendali di Asia Selatan terlibat dalam satu konflik yang disebut sebagai *The Great Game*. Dalam hal ini Uni Soviet memandang Afghanistan sebagai kawasan yang strategis untuk dijadikan sebagai jalan untuk menguasai Asia Selatan dan Samudra Hindia. Sedangkan Inggris melihat Afghanistan sebagai jalan untuk memperkuat kekuatan maritimnya dan ingin menguasai Asia dan Afrika (Hendra, 2019).

Hubungan Afghanistan dan perang dapat dianalogikan sebagai dua sisi mata uang yang tidak pernah bisa dipisahkan satu sama lain. Istilah ini menjadi sebuah kalimat yang paling tepat untuk menggambarkan tentang kondisi negara ini yang sering kali memunculkan konflik dan pertumpahan darah dan berakhir dengan perang. Bahkan sejak tampuk pemerintahan dikuasai oleh Mohammad Daud Khan pada tahun 1973, negara ini semakin tidak kondusif. Apalagi dengan munculnya kelompok Taliban dengan kekuatan massa yang sangat kuat hingga tragedi serangan tanggal 11 September 2001 bertempat di gedung *World Trade Center* (WTC), Amerika Serikat, semakin menyeret Afghanistan dalam pusaran konflik (Suwardi, 2002).

Politik Islam yang terjadi di Afghanistan di era sekarang sangat dipengaruhi oleh pergerakan kelompok Taliban yang dianggap sebagai kaum ekstremis (Nasrullah, [2022](#)). Kasus terbaru terjadi pada bulan Agustus tahun 2021 ketika presiden Ashraf Gani dan pemerintahan diserbu oleh kelompok Taliban yang waktu sekejap berhasil menguasai kota Kabul dan menduduki kantor kepresidenan. Buntut dari tragedi ini, pemerintahan Afghanistan secara resmi dikuasai oleh kelompok Taliban. Kejadian ini menjadi salah satu dari serangkaian panjang dari sejarah politik di Afghanistan.

Dalam proses pengumpulan sumber, penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan *library research*. Ada Empat metode yang digunakan adalah proses heuristik yaitu proses pengumpulan sumber berupa kajian literatur, kritik sumber yaitu tahapan untuk memeriksa kevalidannya sumber dengan fakta sejarah yang terjadi. Selanjutnya tahapan interpretasi yaitu proses memberikan penafsiran dan analisis terhadap fakta yang telah diperoleh sebelumnya. Terakhir proses historiografi yaitu penulisan sejarah.

Berangkat dari serangkaian fakta di atas, tulisan ini ingin melihat bagaimana perkembangan politik Islam di Afghanistan dan kebangkitan kelompok Taliban yang menjadi penguasa terkuat masa sekarang di negara tersebut. Untuk memahami secara lebih jauh persoalan politik di Afghanistan di bawah kekuasaan Taliban, penelitian ini akan menjawab tiga pertanyaan yang telah dirumuskan dalam tiga rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana sejarah dan dinamika politik Afghanistan sebelum Taliban berkuasa; (2) Bagaimana latar belakang lahirnya dan perkembangan kelompok Taliban; (3) Mengapa perpolitikan di Afghanistan menjadi tidak kondusif sejak dikuasai oleh kelompok Taliban.

PEMBAHASAN

Masuknya Islam dan Kekuasaan Politik di Afghanistan

Dalam catatan sejarah Afghanistan modern menyebutkan bahwa Islam mulai memasuki wilayah Afghanistan semenjak era Khalifah Umar bin Khatthab dengan sebuah misi ekspedisi dakwah Islam dan dikomandoi oleh panglima perang bernama Asim bin Umarat Tamimy. Kemudian ketika Khalifah Utsman bin Affan berkuasa, pada tahun 647 M pasukan perang muslim melakukan perluasan daerah lagi untuk menguasai Khurasan (Lee, [2000](#)). Ekspedisi kali ini diketuai oleh panglima perang Sa'ad bin Abi Waqash. Akhirnya setelah melalui pertempuran yang sengit dengan pasukan Persia, wilayah Khurasan berhasil ditaklukkan oleh kaum muslim.

Pada rentang akhir abad ke-7 M, utusan orang-orang Arab dari Dinasti Umayyah memasuki wilayah Afghanistan setelah berhasil memukul mundur penguasa Sassaniah di Nihawand saat itu. Pada masa Hisyam bin Abdul-Malik dan Khalifah Umar bin Abdul-Aziz perluasan Islam semakin ditingkatkan sehingga penduduk yang mendiami wilayah utara telah banyak yang memeluk Islam. Islam semakin berkembang di Afghanistan dari mulai masa Umayyah, Abbasiyah, hingga kekuasaan Islam dipegang oleh dinasti kecil yaitu Ghaznawiyah. Di bawah pimpinan raja Ghaznawiyah bernama Abdul Malik bin Nuh yang memerintah pada tahun 954-961 M semakin memperkuat pengaruh dan perkembangan Islam di wilayah ini (Thohir, [2011](#)).

Pada awalnya wilayah Afghanistan ini lebih dikenal sebagai Khurasan sebab wilayah tersebut menjadi tempat pusat perkembangan Islam di sebelah timur Persia. Seiring dengan perkembangan zaman, wilayah Afghanistan tetap menjadi rebutan banyak pihak. Baru pada tahun 1737 Nadir Syah seorang penguasa Persia di Afghanistan berhasil menaklukkan keseluruhan wilayah sehingga menjadikannya seperti sekarang ini. Polemik pun berlanjut pada tahun 1747 ketika kekuasaan diambil alih oleh Ahmed Khan melalui pertempuran di Khabusan. Ia mendeklarasikan Afghanistan sebagai sebuah wilayah emirat yang berdiri sendiri.

Sejak tahun 1747 M, Inggris dan Uni Soviet yang merupakan dua kekuatan militer kuat saat itu mulai terlibat dalam usaha untuk merebut pengaruh di Afghanistan. Penulis Inggris Rudyard Kipling menyebut fenomena ini sebagai "Permainan Besar". Inggris ingin memperluas kekuatan angkatan lautnya di perairan Asia dan Afrika, sedangkan Uni Soviet melihat Afghanistan sebagai pintu gerbang ke Samudra Hindia dan Asia Selatan. Sebagai hasil dari perang antara Inggris dan Uni Soviet atas Afghanistan pada tahun 1839-1842 dan 1878-1880, Inggris memperoleh kendali atas pantai selatan Laut Arab, yang sekarang berada di wilayah Pakistan. Sejak saat itu, bagaimanapun, serta selama era Perang Dingin yang berlangsung tahun 1950-1989, Afghanistan telah menjadi arena perang antara Inggris dan Uni Soviet,

walaupun kemudian Amerika Serikat dan *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) menghadapi Uni Soviet dan Tiongkok (Azam, [1994](#)).

Setelah cukup lama menjadi rebutan Inggris dan Uni Soviet, akhirnya pada tahun 1926 negara Afghanistan mengumumkan diri sebagai sebuah kerajaan yang independen. Amanullah Khan tampil mendeklarasikan dirinya sebagai raja dan mengubah sistem emirat menjadi sistem monarki absolut. Namun era kekuasaan Amanullah tidak berlangsung lama setelah tim oposisi pimpinan Muhammad Zhahir Syah melakukan kudeta sehingga pemerintahannya jatuh ke tangannya. Zhahir Syah sejatinya merupakan seorang raja yang didukung penuh Uni Soviet sehingga sering terjadi kebijakan yang kontroversial.

Salah satu kebijakan Zhahir adalah dengan melakukan revolusi kebudayaan dengan menghapus bentuk-bentuk syiar Islam bahkan melarang penggunaan hijab bagi perempuan muslim. Kebijakan ini mengundang kemarahan dan pemberontak masyarakat muslim Afghanistan khususnya di wilayah Kandahar (Azam, [1994](#)). Menanggapi pemberontakan ini, sang Raja lalu mengirim pasukan militer ke wilayah Kandahar yang dipimpin oleh Khan Muhammad.

Pada tahun 1953, Raja Zahir Shah mengangkat kerabatnya bernama Muhammad Daud Khan yang merupakan seorang kader komunis sebagai perdana menteri. Di bawah kepemimpinannya, ia menerapkan kebijakan yang berfokus untuk pengembangan ekonomi dan penyebaran pengaruh komunis di seluruh wilayah Afghanistan. Posisi Daud Khan yang semakin kuat ternyata membuat Raja Zhahir marah sehingga memecatnya dari posisi perdana menteri. Kabar ini sampai pada Uni Soviet dan Daud Khan, lalu menyiapkan strategi untuk melakukan kudeta terhadap raja Zhahir (Thohir, [2011](#)). Kudeta ini disebabkan oleh Uni Soviet yang marah karena Raja Zhahir tidak mau tunduk lagi pada mereka dan pengaruh komunis yang tidak berjalan lancar di era kepemimpinan Zhahir tersebut. Tanpa butuh waktu lama kudeta berhasil dilakukan sehingga Muhammad Daud Khan mengambil alih posisi pimpinan. Imbas tragedi ini akhirnya merubah Afghanistan sebagai negara monarki absolut menjadi negara republik (Lee, [2000](#)).

Masa pemerintahan Daud Khan ini mengeluarkan kebijakan untuk membuat konstitusi baru dengan maksud untuk memodernisasi negara berdasarkan prinsip komunis. Konstitusi ini telah banyak memberikan hak-hak kepada perempuan untuk tampil dalam ruang publik. Daud Khan juga tanpa ragu menghabisi lawan-lawan politiknya, gaya ini memiliki hampir sama dengan apa yang dipraktikkan oleh penguasa sebelumnya raja Zhahir Syah. Kebijakan politik luar negeri Daud Khan yang berpegang teguh sebagai negara non blok tanpa memihak negara mana pun ternyata membuat Uni Soviet geram. Akhirnya pada tahun 1978, Partai Rakyat Demokratik Afghanistan (PDPA) yang berhaluan komunis melakukan aksi kudeta sehingga Daud Khan terbunuh. Peristiwa pembunuhan dan kudeta ini dikenal sebagai “Revolusi Saur”. Kursi pemerintahan selanjutnya digantikan oleh Nur Mohammad Taraki sebagai presiden dan Babrak Kamal sebagai wakil perdana menteri (Sicca, [2021](#)).

Presiden Nur Taraki menjadi pemimpin yang sangat dekat dengan Uni Soviet sehingga ingin menerapkan ideologi komunis sebagai ideologi negara. Kebijakan ini ditentang keras oleh kelompok Ulama yang mengeluarkan fatwa untuk mengutuk tindakan Taraki dan menyerukan masyarakat untuk melakukan jihad perang untuk menggulingkannya. Gerakan ini telah melahirkan kelompok pejuang laskar mujahidin di Afghanistan yang lahir untuk melawan ideologi komunis. Kelompok ini ternyata mendapat dukungan dari Amerika Serikat Inggris, dan Arab Saudi. Mereka membantu memasok senjata api untuk melawan Uni Soviet. Tahun 1987 perang meletus dan pasukan Uni Soviet banyak yang kalah dalam pertempuran (Syarifuddin, [2016](#)).

Setelah mengalami kekalahan dalam perang dengan laskar Mujahidin, Uni Soviet lalu mengangkat Muhammad Najibullah sebagai presiden Afghanistan berikutnya. Najibullah sebagai presiden boneka Uni Soviet ini tetap harus menghadapi pemberontakan dari kelompok Mujahidin kelompok ini merupakan gabungan dari berbagai suku di Afghanistan. Diantaranya terdapat 14 kelompok etnis yang dominan yaitu suku Pashtuns 40-50%, suku Tajiks 25%, suku Hazaras dan Uzbeks yang masing-masing berjumlah 9%, dan sisanya kelompok etnis lainnya. kemudian Pada Februari 1988 pemimpin Uni Soviet, Gorbachev mengumumkan bahwa akan menarik seluruh pasukannya secara bertahap dalam 10 bulan. Di tambah oleh kecaman dari negara lain akhirnya Uni Soviet menyetujui perjanjian damai dengan

Afghanistan yang dikenal sebagai *Geneva Accords* pada 14 April 1988. Pasca perjanjian ini seluruh pasukan Uni Soviet ditarik dari Afghanistan pada 1989 (Syarifuddin, [2016](#)).

Tiga tahun setelahnya Presiden Najibullah tidak sanggup lagi membendung serangan dari kelompok Mujahidin yang telah menguasai kota Kabul. Pada 1992 Najibullah menyerah dan kekuasaan dipimpin oleh Burhanuddin Rabbani dan Gulbuddin Hekmatyar yang menjabat sebagai perdana menteri. Dalam perkembangannya, selama dikuasai oleh kelompok Mujahidin kondisi dalam negeri menjadi kacau tidak karuan. Korupsi, perampokan, dan pemerasan terjadi dimana-mana sehingga kondisi ini membuat satu kelompok baru lahir dari kalangan pelajar Islam yang selanjutnya membentuk kelompok yang dikenal sebagai Taliban (Fanani, [2013](#)).

Cikal bakal lahirnya gerakan kelompok Taliban ini adalah dari para murid-murid yang menuntut ilmu di Afghanistan. Kata Taliban sendiri berasal dari bahasan Pastun *taleban* sebagai jamak dari bahasa Arab *thalib* yang berarti murid. Oleh sebab itu "Taliban" merujuk kepada seluruh gerakan yang dilakukan oleh pelajar-pelajar madrasah yang berperan dalam peristiwa-peristiwa politik penting (Musta'id, [2022](#)). Madrasah yang berada di Provinsi Qandahar hingga di arah selatan perbatasan Afghanistan dan Pakistan menjadi kantong-kantong yang tempat konsolidasi gerakan ini. Orang yang mencetus pembentukan Taliban adalah Mohammed Omar, seorang mantan pejuang veteran dalam gerakan melawan Uni Soviet (Fanani, [2013](#)).

Kelompok ini lahir pada tahun 1994 dan langsung melakukan aksi-aksinya hingga berhasil merebut kota Kabul dan menggulingkan pemerintahan kelompok Mujahidin di tahun 1996. Selanjutnya secara bertahap beberapa kota di Afghanistan berhasil diduduki oleh kelompok Taliban, yaitu kota Mezar-e Sharif, Herat Afghanistan Barat, dan Kunduz di Afghanistan Utara. Keberhasilan kudeta ini memperlihatkan sebuah fakta historis bahwa bila pendidikan Islam yang dididik dalam sistem pendidikan madrasah terbukti bisa menjadi sebuah unit yang akhirnya dapat menggerakkan gerakan sosial. Gerakan ini berupa komunitas yang memberikan kesempatan bagi anak muda di Afghanistan untuk *mengupgrade* kemampuannya secara edukatif. Hal ini dibuktikan dengan kemunculan gerakan Taliban, meskipun pada mulanya mereka tidak diketahui oleh publik (Edwards, [2002](#)).

Bagi masyarakat Afghanistan, madrasah memiliki kedudukan khusus dalam masyarakat, di mana peranan madrasah di Afghanistan bukan hanya sebagai lembaga pendidikan Islam, namun juga untuk menjalankan fungsi sosial yang sanggup menyatukan kelompok-kelompok dari berbagai suku yang berbeda dan mampu menafsirkan nilai-nilai Islam dalam setiap perjuangan melawan pengaruh ideologi komunis (Yulia, [2017](#)). Mayoritas pelajar yang bergabung dalam kelompok Taliban ini berasal dari suku Pastun yang merupakan kelompok etnis terbesar di negara Afghanistan. Adapun aliran yang digunakan kelompok Taliban ini adalah aliran Sunni. Penganut aliran Deobandi juga identik sebagai pendukung dari konsep doktrin taklid buta. Mereka adalah penganut mazhab Hanafi (Spevack, [2014](#)).

Sejak awal pembentukan kelompok Taliban telah didukung oleh Pakistan dan Amerika Serikat. Keterlibatan AS dalam membantu Taliban didasari oleh faktor ingin mempertahankan gerakan anti-Soviet itu tetap eksis. Sedangkan keterlibatan Pakistan di sini adalah sebagai dalang dibalik gerakan Taliban. Usaha ini adalah motif politik agar Afghanistan bisa bersahabat dan membantu kepentingan politik Pakistan ke depannya. Pakistan membutuhkan Afghanistan sebagai mitranya agar ketika sewaktu-waktu terjadi perang dengan India, Pakistan telah memiliki negara terdekat yang siap membantu mereka. Lembaga intelijen Pakistan yaitu *Inter Service Intelligence* (ISI) menjadi kendaraan Pakistan dalam menyokong setiap gerakan kelompok Taliban ini (Carolina, [2021](#)).

Pengamat politik dunia menyebutkan bahwa gerakan Taliban ini pada dasarnya terinspirasi oleh sebuah paham aliran Deobandi yang berasal dari sebuah madrasah yang berlokasi di India utara, Darul 'Ulum Deoband. Madrasah ini berdiri sejak tahun 1866. Pengamat politik Afghanistan, William Maley menggambarkan sekolah Deoband sebagai sekolah yang mengajarkan ajaran agama (Islam) dengan cara-cara konservatif. Menurut Maley, kelompok Taliban memandang dosa-dosa dan kejahatan yang terjadi disebabkan oleh penerapan agama yang tidak tepat. Oleh karenanya, ia menganggap penting untuk menciptakan cara berperilaku yang akan memungkinkan solusi atas kesulitan yang diderita Afghanistan. Untuk tujuan ini, Taliban membentuk pasukan keamanan (polisi) yang ditakuti, sebuah departemen yang bertanggung jawab atas pelaksanaan "*amar ma'ruf nahi mungkar*". Apa yang

disebut Maley sebagai "ortodoks" jelas sejalan dengan kerangka kerja Barat di mana Islam, dunia Islam, dan komponen-komponennya dilihat (Maley, [1999](#)).

Secara garis besar kelompok Taliban ini tidak memiliki kebijakan khusus yang mengatur persoalan politik luar negeri. Namun, mereka memiliki kedekatan hubungan dengan Pakistan. Hubungan ini terjadi sebab Pakistan menjadi tempat pelatihan militer para pasukan Taliban. Dalam pergerakannya kelompok ini sangat konservatif dan anti terhadap negara Barat, bahkan sangat anti terhadap paham dan orang Syiah (Maley, [1999](#)). Taliban menekankan interpretasi yang sangat liberal dari setiap ajaran dalam Sunnah Nabi dan lebih lanjut Mereka tidak peduli bahkan menolak semua bentuk budaya Barat, dan hanya menggunakan syariat Islam dalam kehidupan mereka. Kemunculan dan kebangkitan Taliban di wilayah Afghanistan dipandang sebagai sebuah ancaman baru yang sama menakutkannya dengan konflik yang pernah terjadi sebelumnya di Afghanistan.

Taliban adalah sebuah gerakan Islamis dengan ideologi fundamentalis yang berusaha menguasai sisi politik dan sosial Afghanistan dengan berbagai cara. Setelah mereka berhasil menduduki kota Kabul dan memegang kendali penuh pada pemerintahan, kelompok ini secara resmi mendirikan *Islamic Emirate of Afghanistan*. Pimpinan tertingginya adalah Mullah Muhammad Omar dan Mohammad Rabbani Akhund Rabbani sebagai perdana menteri. Pemerintahan Taliban rezim Mullah Omar ini lebih cenderung mengambil kebijakan sepihak terhadap segala hal yang menyangkut persoalan kenegaraan. Ia juga tidak mau berkonsultasi dengan siapa pun kecuali dengan hanya kelompok mereka (Anugerah & Purba, [2021](#)).

Masa pemerintahan Taliban terbilang sangat singkat yaitu dari 1996 hingga 2001. Kejatuhan kekuasaan Taliban ini disebabkan oleh tragedi penyerangan terhadap gedung *World Trade Center (WTC)* pada tanggal 11 September 2001 (Rafidah, [2021](#)). Peristiwa ini kemudian menewaskan 2763 penduduk AS dan 571 warga negara asing. Imbas tragedi ini AS mencurigai kelompok Al-Qaeda pimpinan Osama bin Laden sebagai dalang dibalik aksi teror tersebut dan Taliban dicurigai oleh AS terlibat sebagai kelompok yang melindungi gerakan terorisme Al-Qaeda ini. Dalam waktu yang singkat pasukan AS datang melakukan invasi di Afghanistan untuk memburu Osama bin Laden sekaligus melengserkan Taliban sebagai penguasa (Azria & Ramayani, [2022](#)).

Kondisi Sosial Politik Afghanistan di Bawah Kekuasaan Taliban

Selama memimpin Afghanistan dalam kurun waktu 1996 hingga 2001 Taliban telah banyak menerapkan kebijakan-kebijakan yang dipandang oleh dunia internasional sebagai kebijakan radikal. Kemudian dasar negara yang mereka usung berdasarkan prinsip syariat Islam yang sesuai dengan penafsiran mereka. Dalam menjalankan pemerintahannya kelompok Taliban ini tidak dapat berjalan mulus sebab terjadi banyak peperangan terutama dengan kelompok gerakan anti Taliban pimpinan Ahmad Shah Massoud. Imbas dari perang ini mengakibatkan pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan kesehatan menjadi terhambat. Saat itu ketersediaan air bersih dan listrik menjadi sangat minim bahkan ditambah dengan kondisi keamanan yang tidak pernah kondusif. Kondisi ini membuat rakyat Afghanistan menderita karena kekurangan kebutuhan primernya seperti pangan, air, dan hunian yang aman. Meskipun telah menguasai hampir 90% wilayah Afghanistan rupanya tidak menjamin kemakmuran terhadap rakyat. Konflik politik terus-terusan berkejolak dan banyak memakan korban jiwa (Carolina, [2021](#)).

Dalam bidang kebudayaan, beberapa kebijakan pemerintah Taliban ini adalah pelarangan musik selain musik Islami, pelarangan bioskop, penghancuran peninggalan kebudayaan dari agama selain Islam, hingga bentuk jenggot pria harus sesuai aturan. Selanjutnya, kelompok ini melarang Wanita untuk bersekolah dan bekerja, wanita harus berada di rumah bila keluar wajib bersama mahram (Sicca, [2021](#)). Wanita juga diwajibkan untuk memakai cadar dan burka. Kebijakan semacam ini tentu sangat mengekang hak asasi wanita sebab bila ketahuan melanggar akan langsung dieksekusi.

Kebijakan radikal semacam ini ditambah dengan tragedi WTC membuat kelompok yang berseberangan dengan Taliban apalagi dengan ikut campurnya pasukan militer AS membuat gerakan Taliban semakin berkurang pengaruhnya. Ahmad Shah Massoud dan AS membentuk Aliansi Utara (*Northern Alliance*). Aliansi ini bahkan didukung

oleh India, Iran, Rusia, Israel, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Tajikistan. Akhirnya setelah invasi besar-besar militer AS wilayah kekuasaan Taliban menyusut (Fanani, [2013](#)).

Setelah kekuasaan Taliban jatuh kursi pemimpin Afghanistan kembali dikuasai oleh kelompok Mujahidin Burhanuddin Rabbani. Kemudian secara berturut-turut posisi presiden Afghanistan diisi oleh Hamid Karzai (2001-2014), Ashraf Ghani Ahmadzai (2014-2021), dan Amrullah Saleh (2021). Meski dikuasai oleh presiden yang pro terhadap AS, pengaruh Taliban rupanya masih mengakar kuat pada setiap anggotanya, kekuatan Taliban ini terus dikonsolidasikan. Puncaknya kelompok Taliban ini kembali tampil ke publik dengan melakukan kudeta secara tiba-tiba.

Pada tanggal 15 Agustus 2021 Taliban telah berhasil menguasai kota Kabul dan bersiap untuk menduduki istana dengan kekuatan pasukan yang cukup kuat. Kondisi ini membuat Presiden Ashraf Gani merasa terancam dan terpaksa melarikan diri ke Tajikistan (Nasrullah, [2022](#)). Kaburnya Ashraf Gani, membuat kelompok Taliban secara resmi mengkudeta dan menjadi penguasa Afghanistan untuk kedua kalinya. Akhirnya salah satu tokoh pendiri Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar menyatakan sebagai Presiden baru Afghanistan. Setelah menguasai Afghanistan kelompok Taliban ini kembali mengkampanyekan kebijakan untuk memberikan hak-hak dan kemakmuran bagi warga Afghanistan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Juru bicara Taliban Zabihullah dalam konferensi persnya mengatakan “Kami ingin dunia mempercayai kami, Taliban akan berusaha meyakinkan masyarakat yang khawatir kalau organisasi itu akan kembali membawa hukum dan ketertiban ke Afghanistan seperti dulu. Kami berjanji bahwa kekerasan dan kesengsaraan aturan sebelumnya tidak akan terulang lagi”

Apa yang disampaikan oleh Zabihullah ini tidak sesuai dengan realitas yang terjadi. Perempuan kembali menjadi korban atas kebijakan Taliban yang baru ini. Taliban telah memastikan bahwa golongan perempuan akan dapat belajar di ruang kelas yang terpisah secara gender, asalkan mereka mengenakan jilbab. Penjabat Menteri Pendidikan Tinggi Taliban, Abdul Baqi Haqqani, mengungkapkan bahwa perempuan dapat melanjutkan studinya hingga ke tingkat pascasarjana, namun mereka akan dipisahkan berdasarkan jenis kelamin dan mereka wajib mengenakan pakaian seperti wanita Muslim. Pernyataan ini dibuat oleh Menteri Haqqani saat konferensi pers pasca penguasa baru Afghanistan membentuk kabinetnya yang semuanya terdiri atas laki-laki (Nasrullah, [2022](#)).

Dalam sebuah artikel berita yang diterbitkan oleh BBC News, media ini memuat berita tentang kondisi seorang perempuan yang menjadi presenter acara *TV Tolo* yang diwajibkan untuk menutup wajah saat membaca berita. Kewajiban ini mendapat kritikan oleh para jurnalis dengan mereka juga menutup seluruh wajahnya ketika tampil sebagai pembawa berita. Kebijakan kontroversial lain adalah dengan melarang perempuan untuk mengemudi, perempuan dilarang terlibat dalam kegiatan olahraga, hingga pembubaran kementerian perempuan di Afghanistan (News, [2022](#)).

Untuk menciptakan kondisi politik dan keamanan di Afghanistan sangatlah tidak mudah. Sistem birokrasi dan administrasi pemerintahan yang selama ini berasal dari warisan pemerintah AS sangat kotor dan korup. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa negara Afghanistan saat itu adalah negara demokrasi yang memakai model Barat. Bahkan jika Taliban mampu mengintegrasikan kelompok-kelompok terdahulu yang memutuskan untuk tetap tinggal di Afghanistan, mereka belum tentu mampu membangun birokrasi dan sistem administrasi pemerintahan yang sehat (Anugerah & Purba, [2021](#)). Taliban juga menghadapi masalah yang lebih besar yaitu untuk mencapai kondisi politik dan keamanan yang sehat, damai, dan inklusif di negara ini, mereka harus mampu mengikutsertakan semua keragaman yang ada, terutama keragaman etnis, untuk berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan. Hal ini untuk menghindari kesan bahwa Afghanistan hanya milik kelompok etnis Pashtun, yang mendominasi struktur organisasi Taliban (Syarifuddin, [2016](#)).

Kondisi keamanan dan politik yang baik juga memerlukan penerimaan dan pengakuan dari banyak negara-negara lain. Afghanistan pada dasarnya merupakan sebuah negara berdaulat. Meskipun demikian, apakah rezim Taliban saat ini akan diakui secara hukum oleh masyarakat internasional adalah pertanyaan lain. Bentuk pengakuan dan sikap bantuan oleh negara-negara lain merupakan sebuah pemantik yang penting bagi peningkatan ekonomi serta pembangunan nasional Afghanistan di masa depan. Hal ini terutama untuk membangun Kembali negara Afghanistan yang telah gagal secara total dalam mewujudkan narasi besarnya tentang Afghanistan yang demokratis (Nasrullah,

2022). Dalam konteks ini, Taliban harus menerapkan kontestasi pemilihan umum sebagai jalan untuk meraih partisipasi publik dan keberlangsungan elit dalam pemerintah. Hal tersebut telah menawarkan kemungkinan untuk menciptakan situasi-situasi kondusif bagi perpolitikan dan keamanan di negara Afghanistan dalam jangka waktu yang panjang.

SIMPULAN

Afghanistan merupakan sebuah negara Islam yang sering dilanda konflik dan masih bertahan hingga sekarang dengan kekuasaan di bawah kelompok Taliban. Dinamika politik di Afghanistan ini sangat akrab dengan fenomena pemberontakan dan kudeta. Pada 1926 penguasa Amanullah Khan merubah sistem kenegaraan Afghanistan menjadi monarki absolut. Selang beberapa tahun Muhammad Zahir Syah melakukan kudeta sehingga pemerintahannya jatuh ke tangannya. Kudeta berikutnya dilakukan oleh Muhammad Daud Khan yang mengambil alih posisi pimpinan dan mendeklarasikan Afghanistan sebagai negara monarki absolut menjadi Negara Republik. Pada tahun 1978 giliran Nur Mohammad Taraki yang berhasil melakukan kudeta hingga Afghanistan dipegang oleh kelompok Mujahidin pasca Uni Soviet menarik pasukannya dari Afghanistan.

Kekuasaan Mujahidin yang dianggap tidak bisa mengurus negara memicu lahirnya kelompok baru pada tahun 1994 yang bernama Taliban. Dua tahun usianya Taliban langsung melakukan aksi-aksinya hingga berhasil merebut kota Kabul dan menggulingkan pemerintahan kelompok Mujahidin di tahun 1996. Selama memimpin Afghanistan dalam kurun waktu 1996 hingga 2001 Taliban telah banyak menerapkan kebijakan-kebijakan yang dipandang oleh dunia internasional sebagai kebijakan radikal. Dasar negara yang diusung berdasarkan prinsip syariat Islam yang sesuai dengan penafsiran mereka. Pada tanggal 15 Agustus 2021 kelompok Taliban melakukan kudeta secara tiba-tiba terhadap Presiden Ashraf Gani dan mendeklarasikan sebagai pemimpin Afghanistan yang sah. Di bawah kepemimpinan Taliban di era baru ini, kebijakan yang diterapkan tidak banyak berbeda dengan apa yang mereka praktikkan sebelumnya. meskipun mereka berjanji untuk memberikan hak-hak dan kemakmuran bagi warga Afghanistan. Namun pada kenyataannya masih banyak kebijakan yang kontroversial dan Perempuan kembali menjadi kelompok yang paling menjadi korban atas kebijakan ini. Hal ini pula yang membuat kondisi politik dan keamanan di Afghanistan jauh dari kata kondusif.

REFERENSI

- Anugerah, B. O. Y., & Purba, J. (2021). Taliban dan Signifikansinya Terhadap Geopolitik Global: Afghanistan's Political and Security Conditions under Taliban's Regime and Its Significances to Global Geopolitics. *Journal of Political Science and International Relations*, 9(1). <https://doi.org/10.15642/JPSIR.2021.9.1.1-17>
- Azam, A. (1994). *Perang Afghanistan*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Azria, K., & Ramayani, E. (2022). Sejarah Perang Afghanistan Dari Dulu Hingga Kini. *Jurnal PIR: Power in International Relations*, 6(2), 122–137. <https://doi.org/10.22303/pir.6.2.2022.122-137>
- Carolina, G. (2021). *Sejarah Taliban, Asal Usul Taliban di Afghanistan*. Zenius. <https://www.zenius.net/blog/3331/sejarah-taliban-asal-usul-taliban-di-afghanistan>
- Edwards, D. B. (2002). *Before Taliban: Genealogies of the Afghan Jihad*. Berkeley, CA: University of California Press.
- Fanani, A. (2013). Wajah Politik Afghanistan Era 1933–2002 dalam *The Kite Runner* Karya Khaled Hosseini. *Diglossia: Jurnal Kajian Ilmiah Kebahasaan Dan ...*, 2(1), 18–26. <http://www.journal.unipdu.ac.id/index.php/diglossia/article/view/317>
- Hendra. (2019). Babak Baru the Great Game Afghanistan Pasca Kemenangan Taliban. *The Global Review*. <https://globalreview.co/babak-baru-the-great-game-afghanistan-pasca-kemenangan-taliban/>
- Lee, J. L. (2000). *Afghanistan: A History from 1260 to the Present*. London: Reaktion Books Ltd.
- Maley, W. (1999). *Taliban dan Multi Konflik di Afghanistan*. Yogyakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Musta'id, A. (2022). Sejarah Islam dan Politik Afghanistan. *Jurnal Ilmiah Syi'ar*, 6(2), 228–243. <https://doi.org/10.24269/isyar.v6i2.3475>
- Nasrullah, N. (2022, April 13). *Prahara Kudeta Afghanistan Hingga Taliban Berkuasa*. Republika. <https://republika.co.id/share/rbss7l368>
- News, B. (2022, August 15). *Setahun Kekuasaan Taliban, Bagaimana Hak-hak Perempuan Afghanistan Direnggut*. BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58240534>

- Rafidah, M. (2021). Perspektif Islamophobia Pasca Tragedi 11 September 2001. *Local History & Heritage*, 1(1), 15–20. <https://doi.org/10.57251/lhh.v1i1.20>
- Sicca, S. P. (2021, September 5). Kisah Perjalanan Panjang Sejarah Afghanistan Dari Zaman Kuno Hingga Sekarang. *Kompas*. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/09/05/070000>
- Spevack, A. (2014). *The Arhetypal Sunni Scholar: Law, Theology, and Mysticism in the Synthesis of AlBajuri*. State University of New York Press.
- Supriadi, D. (2008). *Sejarah Peradaban Islam*. Pustaka Setia.
- Suwardi, S. S. (2002). Penyerangan Amerika Serikat Di Afghanistan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(2), 228-243. <http://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/2719>
- Syarifuddin, H. (2016). Islam Modern Di Afghanistan. *Istiqra'*, 4(1), 60–66.
- Thohir, A. (2011). *Studi Kawasan Dunia Islam: Perspektif Etno Linguistik dan Geo Politik*. PT Raja Grafindo Persada.
- Yulia, A. (2017). *Perubahan Sikap Hamid Karzai Terhadap Taliban Di Afghanistan*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang.